

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan ekonomi yang banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran UMKM memberikan dampak positif baik di tingkat makro maupun mikro: penyerapan tenaga kerja, peningkatan permintaan, peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan investasi (Hudha, 2017). Undang–Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai salah satu kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperluas peluang kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas, proses peningkatan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan merealisasikan stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kontribusi UMKM di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Sektor UMKM mampu bertahan dari krisis, seperti dalam krisis yang melanda Bangsa Indonesia pada tahun 1998 silam. Hingga saat ini, UMKM dapat mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan dari berbagai krisis tersebut. Pertama, UMKM biasanya memproduksi barang dan jasa konsumsi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMKM tidak bergantung pada bahan baku impor melainkan memanfaatkan sumber daya lokal dalam hal sumber daya manusia, modal, bahan baku dan peralatan. Ketiga, bisnis UMKM umumnya menggunakan modal yang

relatif kecil (Potensi Usaha Mikro Kecil Sensus Ekonomi Provinsi Jambi 2016, 2018).

Keberhasilan UMKM tidak terlepas dari kerja keras pemilik dalam mengelola dan menjalankan usaha serta strategi pengelolaan yang diterapkan. Keberhasilan UMKM tidak terlepas dari pemanfaatan informasi akuntansi untuk mendukung kegiatan UMKM. Menurut Efriyenty (2020) penggunaan informasi akuntansi adalah informasi yang diwajibkan untuk bisnis dan harus disediakan oleh bisnis berdasarkan undang-undang serta peraturan lain yang resmi di Indonesia. Di sisi lain, menurut Haswell dan Holmes (1989) dalam (Hudha, 2017) minimnya informasi akuntansi dalam mengelola usaha dapat mengkhawatirkan keberlangsungan hidup UMKM.

Meskipun memiliki banyak manfaat dan prestasi, UMKM juga memiliki banyak keterbatasan yang membuat usaha ini sulit untuk berkembang dengan cepat. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya, kurangnya akses perbankan dalam memberikan kredit, kurangnya keterampilan dan pemahaman SDM sehingga dioperasikan dengan cara yang relatif sederhana, terbatasnya pengaplikasian teknologi serta belum mampu mengimbangi pergantian selera konsumen terlebih yang berorientasi ekspor (Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Jambi, 2019). Listiorini (2018) menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM saat ini tidak memiliki pencatatan akuntansi yang simetris, sehingga tidak dapat memisahkan secara jelas antara uang pribadi dan uang usaha, hal ini akan menyulitkan UMKM untuk berkembang menjadi lebih besar.

Ramadhani et al (2018) menyatakan bahwa banyak UMKM yang tidak mampu memakai informasi akuntansi sesuai dengan aturan dalam pengelolaan usaha, apalagi menyelenggarakan pencatatan keuangan dengan baik. Informasi akuntansi diperlukan dalam menyediakan berbagai informasi terkait dengan keuangan perusahaan, namun dalam persaingan usaha yang semakin sengit ini masih banyak pelaku usaha yang tidak menyadari pentingnya penggunaan informasi akuntansi tersebut. Laporan keuangan merupakan salah satu elemen paling dasar dari tata kelola UMKM, namun masih belum banyak UMKM yang melakukannya. Dari sekitar 310.000 UMKM yang tidak berbadan hukum, kurang dari 4% saja yang memiliki pencatatan keuangan. Padahal tanpa adanya laporan keuangan akan sulit untuk menilai kinerja atau *progress report* suatu bisnis atau usaha (Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Jambi, 2019).

Seiring dengan persaingan usaha, sumber permodalan atau pendanaan merupakan salah satu masalah utama. Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016 Lanjutan, lebih dari 54% UMK dilaporkan memiliki masalah permodalan, lebih besar jika dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Hanya sekitar 9,63% saja UMKM yang berhasil mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Mayoritas UMKM mengandalkan modal dari uang pribadi atau dari sumber pendanaan informal, salah satunya rentenir (Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Jambi, 2019). Sebenarnya pemerintah telah mencanangkan program terkait pembiayaan UMKM yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR adalah program pembiayaan/kredit berbunga rendah yang disubsidi pemerintah, dimana 100% dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan didistribusikan dalam bentuk dana investasi dan dana modal kerja. Subsidi bunga merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah, keringanan lainnya yaitu dengan adanya pola penjaminan sehingga agunan pokok atau jaminan utama KUR berupa usaha atau target pendanaan yang dibiayai (kur.ekon.go.id). Program KUR dinilai masih belum terealisasi dengan baik dan belum mencapai tujuannya. Hingga 2019, hanya sekitar 20% dari alokasi anggaran pembiayaan UMKM (setara Rp 11 triliun) yang disalurkan ke UMKM (Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 2021 oleh TNP2K).

Rendahnya realisasi KUR disebabkan karena sulitnya perbankan membuka akses kredit pada UMKM dikarenakan beberapa penilaian. Pertama, besarnya biaya administrasi untuk memilih, mendistribusikan, memantau, dan mengumpulkan pembayaran kredit berskala kecil kepada UMKM. Kedua, UMKM saat ini dinilai berpotensi mengalami kredit macet karena tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan kredit, selain itu sistem pencatatan keuangannya dinilai kurang memadai sehingga menyulitkan pihak perbankan dalam memilih dan menilai kelayakan UMKM. Ketiga, karena belum adanya penjaminan untuk kredit berskala kecil, sehingga bank hanya menilai kelayakan kredit dari sisi kesanggupan UMKM dalam memberikan agunan (Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 2021 oleh TNP2K).

Laporan keuangan UMKM dibutuhkan oleh pihak perbankan untuk menginterpretasikan kemampuannya dalam mengolah dana, dan memperkirakan risiko kegagalan usaha. Bank mendapatkan tugas untuk menyalurkan KUR dalam jumlah besar tetapi sejauh ini tidak dapat dipenuhi secara optimal, namun disisi lain banyak UMKM yang kesulitan dalam menyediakan informasi akuntansi berkualitas yang memungkinkan bank dapat menilai kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba dengan baik. Hal seperti ini membuat bank mengalami dilema (Anggraini et al., 2019).

Tentu saja untuk membuat situasi UMKM menjadi lebih baik dimasa depan, diperlukan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat dipelajari oleh pelaku UMKM yang akan mengajukan kredit perbankan agar berhasil memperolehnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor profesionalisme dan performa usaha yang tergambar dari kemitraan usaha, jumlah pegawai dengan sertifikat keahlian dan profesi, adanya laporan keuangan, lama usaha beroperasi, keanggotaan dalam suatu asosiasi usaha, penggunaan internet, keanggotaan dalam koperasi, skala usaha, dan akses modal saat berdiri (Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Jambi, 2019).

Perkembangan UMKM yang signifikan di Indonesia dapat dilihat dari tabel perkembangan usaha UMKM Tahun 2010 - 2019 berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM di Indonesia

NO	TAHUN	JUMLAH UNIT USAHA UMKM	JUMLAH TENAGA KERJA UMKM
1	2010	52.764.750 Unit	96.193.623 Orang
2	2011	54.114.821 Unit	98.238.913 Orang
3	2012	55.206.444 Unit	101.722.458 Orang
4	2013	56.534.592 Unit	107.657.509 Orang
5	2014	57.895.721 Unit	114.144.082 Orang
6	2015	59.262.772 Unit	123.229.386 Orang
7	2016	61.651.177 Unit	112.828.610 Orang
8	2017	62.922.617 Unit	116.673.416 Orang
9	2018	64.194.057 Unit	116.978.631 Orang
10	2019	65.465.497 Unit	119.562.843 Orang

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2019. Peningkatan ini berdampak pada meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, serta kontribusi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja yang juga meningkat. Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia juga dibarengi dengan peningkatan jumlah UMKM yang ada di Provinsi Jambi, berikut tabel perkembangan UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2019 dan 2021

Tabel 1.2
Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2019 dan 2021

NO	Perkembangan UMKM	Tahun	
		2019	2021
1	Unit Usaha UMKM		
	- Usaha Mikro	123.160 Unit	152.373 Unit
	- Usaha Kecil	14.170 Unit	10.708 Unit
	- Usaha Menengah	1.140 Unit	2.416 Unit
	Jumlah UMKM	138.470 Unit	165.497 Unit
2	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	188.947 Orang	289.569 Orang

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Data yang peneliti dapatkan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, menjelaskan bahwa UMKM di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dalam segi jumlah unit usaha maupun dalam segi serapan tenaga kerja. Pada tahun 2019 Jumlah UMKM di Provinsi Jambi sebanyak 138.470 unit, meningkat pada tahun 2021 menjadi 165.497 unit, meningkat 27.027 unit dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga terjadi pada jumlah tenaga kerja terserap, pada tahun 2019 jumlah tenaga terserap di Provinsi Jambi sebanyak 188.947 orang, meningkat pada tahun 2021 menjadi 289.569 orang, meningkat sebanyak 100.622 orang dibanding tahun sebelumnya.

Kota Jambi menjadi pusat pergerakan ekonomi di Provinsi Jambi. Dari 11 Kabupaten/Kota, jumlah UMKM di Kota Jambi mencapai 19,27%, disusul Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo yang jumlah UMKM nya mendekati 10% (Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Jambi, 2019). Berikut adalah tabel jumlah UMKM per kecamatan di Kota Jambi Tahun 2019.

Tabel 1.3

Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Telanaipura	1.444 Unit
2	Jambi Timur	1.487 Unit
3	Pasar Jambi	964 Unit
4	Jambi Selatan	1.180 Unit
5	Pelayangan	648 Unit
6	Danau Teluk	670 Unit
7	Jelutung	764 Unit
8	Kota Baru	1.173 Unit

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
9	Paal Merah	1.489 Unit
10	Alam Barajo	1.213 Unit
11	Danau Sipin	1.815 Unit
Jumlah		12.847 Unit

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi

UMKM bidang penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman memiliki presentase sebesar 15,56% dari total UMKM yang ada di Provinsi Jambi (Potensi Usaha Mikro Kecil Sensus Ekonomi Provinsi Jambi 2016, 2018). UMKM penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman berkembang dengan baik di Kota Jambi, salah satu UMKM yang saat ini sedang giat-giat nya mengembangkan diri adalah UMKM jenis minuman kekinian, seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini banyak sekali kedai-kedai ataupun cafe-cafe yang menjual berbagai macam jenis minuman baik yang tradisional maupun yang modern seperti kedai kopi, boba, thaitea, cheese tea dan aneka minuman kekinian lainnya yang umum dijumpai di setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi.

Kedai kopi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai lebih dari 2.950 gerai, hal ini di ungkapkan dalam riset TOFFIN penyedia solusi bisnis berupa produk dan layanan Industri HOREKA (Hotel, Restoran, dan Kafe) bersama majalah MIX MarComm. Jumlah tersebut diproyeksikan bertambah tiga kali lipat atau bertambah sekitar 1.950 gerai dari tahun 2016 yang hanya sekitar 1000 gerai. Pada tahun 2020 kedai kopi diprediksi meningkat 10–15%. Riset ini hanya mencakup kedai-kedai, gerai-gerai ataupun café-cafe berjaringan di kota-kota besar, tidak termasuk kedai kopi yang tidak berjaringan baik modern maupun

tradisional di berbagai daerah yang memungkinkan jumlah rill kedai kopi bisa lebih besar lagi (sumber: beritasatu.com).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM menerapkan informasi akuntansi dalam usahanya, diantaranya jenjang pendidikan, lama usaha dan pelatihan akuntansi. Jenjang pendidikan menurut Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan akan mempengaruhi pelaku UMKM dalam menggunakan informasi akuntansi, semakin tinggi pendidikan pelaku usaha maka akan sangat mempengaruhi cara mereka dalam berpikir. Tingkat pendidikan menentukan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya penerapan akuntansi bagi usahanya (Johan dan Nahrudien, 2020).

Lama usaha adalah lamanya suatu UMKM berdiri atau umur dari UMKM semenjak usaha tersebut berdiri sampai pada saat penelitian ini dilakukan. Lama usaha dapat mempengaruhi UMKM untuk menggunakan informasi akuntansi dalam menjalankan usaha. Semakin lama umur suatu usaha maka akan semakin membutuhkan informasi akuntansi yang lebih kompleks mengenai usahanya (Johan dan Nahrudien, 2020). Sementara itu, pelatihan akuntansi adalah usaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan akuntansi secara individu untuk mencapai keahlian dan kemampuan serta keterampilan yang ada agar berhasil dalam mengembangkan usaha (Umami et al., 2020). Semakin sering seorang pelaku UMKM mengikuti pelatihan akuntansi, maka akan semakin baik pula kemampuannya dalam menggunakan informasi akuntansi (Efriyenty, 2020).

Penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Dian Efriyenty (2020) menyatakan bahwa jenjang pendidikan, lama usaha, dan pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Awanda Nirwana dan Dendi Purnama (2019) menyatakan bahwa jenjang pendidikan, skala usaha dan lama usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Febrinda Rizky Ramadhani, Puji Lestari dan Saras Supeno (2018) menyatakan bahwa pendidikan pemilik, masa memimpin, umur perusahaan, pelatihan akuntansi dan ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Desi Susilawati, Ni Nyoman Yuliati dan Herawati Khotmi (2017) menyatakan bahwa secara parsial dan simultan variabel jenjang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha dan masa memimpin perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Candra, Rita Rahayu, dan Denny Yohana (2020) menyatakan bahwa umur perusahaan, pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, skala usaha dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi, sedangkan pendidikan pemilik/manajer berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Robby Johan dan Nahrudien Akbar M (2020) menyatakan bahwa variabel independen pengetahuan akuntansi, jenjang pendidikan, lama usaha dan skala usaha tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel dependen penggunaan informasi akuntansi UMKM di

Kabupaten Karawang. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Asri Pramesti, Putu Kepramareni dan I Nyoman Agus Juliatmika (2019) menyatakan bahwa Jenjang pendidikan, Ukuran usaha, Lama Usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di Kecamatan Abiansemal. Penelitian lainnya yang dilakukan Dewi Retno Sriwahyuni, Fatahurrzak, Inge Lengga Sari Munthe (2016) menyatakan bahwa pendidikan pemilik/manajer, umur perusahaan, skala usaha, pelatihan akuntansi dan pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi, hanya masa memimpin perusahaan yang berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Hasil dari beberapa penelitian diatas memiliki dua pandangan berbeda yang saling berseberangan, maka dari itu peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi dengan menggunakan variabel yang telah diuji sebelumnya yaitu Jenjang Pendidikan (X_1), Lama Usaha (X_2), dan Pelatihan Akuntansi (X_3). Dengan dilaksanakannya penelitian mengenai penggunaan informasi akuntansi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran para pelaku UMKM khususnya jenis minuman di Kota Jambi untuk lebih memahami manfaat penggunaan informasi akuntansi sehingga diharapkan dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam dengan judul **“Pengaruh Jenjang Pendidikan, Lama**

Usaha, dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM Jenis Minuman di Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis pengaruh jenjang pendidikan, lama usaha dan pelatihan akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah jenjang pendidikan, lama usaha dan pelatihan akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi?
2. Apakah jenjang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi?
3. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi?
4. Apakah pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Mengetahui pengaruh jenjang pendidikan, lama usaha dan pelatihan akuntansi secara simultan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi.

2. Mengetahui pengaruh jenjang pendidikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi.
3. Mengetahui pengaruh lama usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi.
4. Mengetahui pengaruh pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, berikut beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai pengaplikasian berbagai ilmu yang telah dipelajari dan sebagai penambah wawasan serta pemahaman mengenai jenjang pendidikan, lama usaha, dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi.

2. Manfaat Bagi UMKM

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi UMKM adalah pengembangan akuntansi yang lebih baik dapat meningkatkan jenjang pendidikan, lama usaha dan pelatihan akuntansi sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih tepat serta dapat meningkatkan nilai usaha baik dalam segi finansial maupun non finansial.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi pemerintah adalah sebagai saran terkait peningkatan pembinaan ataupun pelatihan terhadap penggunaan akuntansi dalam rangka pengembangan UMKM.

4. Manfaat Bagi Peneliti Lainnya

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi peneliti lainnya adalah sebagai sumber bacaan tambahan dalam menambah wawasan dan pemahaman mengenai jenjang pendidikan, lama usaha dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM jenis minuman di Kota Jambi.